



## PENGARUH KOORDINASI TERHADAP PENINGKATAN KEAMANAN DI KAWASAN WISATA PANTAI ANYER OLEH DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

<sup>1</sup>Hendra Susanto

<sup>1</sup> STIA Maulana Yusuf, Banten, Indonesia

---

### INFO ARTIKEL

Diterima 20 Mei 2022  
Direvisi 30 Mei 2022  
Diterima 20 Juni 2022

Kata Kunci :  
pariwisata, koordinasi,  
administrasi

Keywords :  
Tourism, coordination,  
administration

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi oleh Ditpamobvit Polda Banten terhadap peningkatan keamanan di kawasan wisata Pantai Anyer. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan korelatif. Permasalahan diteliti secara komprehensif, mendalam dan menelaah variabel-variabel yang ada. Dari populasi yang ada seluruhnya dijadikan responden yaitu sebanyak 48 orang. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan pengujian statistik dengan rumus Rank Spearman. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesis tentang besar pengaruh koordinasi oleh Ditpamobvit Polda Banten terhadap peningkatan keamanan di kawasan wisata Pantai Anyer menunjukkan angka korelasi 0.9752 artinya hubungan yang sangat kuat. Sedangkan koefisien determinasi koordinasi dengan keamanan di kawasan wisata Pantai Anyer sebesar 95.11%, Sedangkan sisanya yaitu 4.89% keamanan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the coordination by Ditpamobvit Polda Banten has on increasing security in the Anyer Beach tourist area. This research uses quantitative and correlative methods. The problem is researched comprehensively, in-depth and examines the existing variables. From the existing population, all of them were used as respondents, namely as many as 48 people. Hypothesis testing is carried out using quantitative analysis and statistical testing using the Spearman Rank formula. The results of calculations for the hypothesis about the effect of coordination by Ditpamobvit Polda Banten on increasing security in the tourist area of Anyer Beach show a correlation number of 0.9752, which means a very strong relationship. While the coefficient of determination of coordination with security in the tourist area of Anyer Beach is 95.11%, while the remaining 4.89% is influenced by other variables not examined in this study.

---

\* Corresponding author at:  
STIA Maulana Yusuf

## 1. Pendahuluan

Keamanan dan keselamatan menjadi kondisi yang sangat penting dalam industri pariwisata. Aspek tersebut pada dua dekade terakhir telah menjadi isu yang semakin besar dan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan wisata. Keamanan dan keselamatan wisatawan dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh beragam faktor, seperti aksi teroris, konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat dan penyakit menular sehingga hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya rasa aman bagi wisatawan. Keamanan dan keselamatan bagi wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu destinasi pariwisata.

Pesatnya pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia merupakan tantangan yang cukup kompleks dalam memberikan rasa nyaman dan rasa aman (*comfort and safety*) bagi wisatawan. Pada kenyataannya dalam suatu destinasi wisata, banyak wisatawan tidak mendapatkan rasa aman yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tuan rumah atau *host* (pedagang asongan, pelayanan parkir, penawaran jasa pijat (*massage*) yang terlalu agresif, dan yang lainnya. Kasus seperti ini sering terjadi di kawasan pariwisata yang sedang berkembang.

Upaya menjamin keamanan dan keselamatan pariwisata khususnya para wisatawan merupakan bagian dari tuntutan masyarakat agar sebuah destinasi wisata dapat terus menarik wisatawan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 1991 WTO telah merekomendasikan upaya-upaya yang perlu diambil untuk keamanan pariwisata yaitu bahwa “tiap-tiap Negara hendaknya mengembangkan suatu kebijakan nasional bidang keselamatan pariwisata yang diselaraskan dengan upaya pencegahan resiko-resiko bagi wisatawan”.

Menyadari pentingnya faktor keamanan dan keselamatan wisatawan maka muncul gagasan *World Tourism Organization (WTO)* untuk memberikan tuntunan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di berbagai industri pariwisata. Keamanan dan keselamatan pengunjung bukan saja semata menjadi tanggung jawab pemilik (*owner*) atau pengelola destinasi wisata tetapi juga bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun pusat (*stakeholder*) dalam memajukan pariwisata di tingkat daerah. Keamanan dan keselamatan pengunjung diprediksikan akan memberikan kontribusi pada peningkatan pengunjung selanjutnya dan akan merupakan faktor pendorong terciptanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat (*company sosial responsibility atau CSR*).

Pengamanan obyek-obyek vital menjadi tanggungjawab bersama seluruh pihak terkait (*stakeholders*). Oleh karena itu, dalam pengamanan obvit Polri harus berkoordinasi dengan

berbagai stakeholders, seperti pengelola obvit, pemerintah daerah, TNI, Ormas/LSM, Pers dan masyarakat. Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan obvit.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi Ditpamobvit Polda Banten belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya gejala-gejala sebagai berikut :

1. Masih sering terjadi miskomunikasi diantara unit-unit kerja.
2. Adanya penglihatan, sikap dan nilai yang berlainan dari jaringan sistem kerja.

Akibat gejala masalah di atas, ada kecenderungan menimbulkan masalah lain yaitu masyarakat masih merasa kurang aman di tempat wisata, hal ini terlihat dari gejala sebagai berikut:

1. Wisatawan masih merasa belum bebas dari gangguan kejahatan
2. Wisatawan belum merasa terlindung dari bahaya kejahatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan judul: "Pengaruh Koordinasi Oleh Ditpamobvit Polda Banten Terhadap Peningkatan Keamanan Di Kawasan Wisata Pantai Anyer"

## **2. Kajian Teori**

Sebelum membahas pengertian koordinasi dan aspek-aspek, penulis terlebih dahulu mengemukakan mengenai pengertian administrasi dan organisasi.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di sadarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya" (Siagian, Filsafat Adminisrtasi, 2011:3).

Kemudian menurut H. Hadari Nawawi dan H.M.Martini Hadari dalam Bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut:

Administrasi adalah rangkaian kegiatan atau proses pengendalian suatu organisasi agar secara keseluruhan selalu rerarah pada pencapaian tujuannya. Dengan demikian administrasi berarti rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau sistem kerja sama sejumlah orang, agar berlangsung efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama.(2014:26).

Sedangkan J. Wayong yang dikutip oleh H. Hadari Nawawi dan H.M Martini Hadari, mengemukakan bahwa: "Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan suatu usaha (pemerintah) agar tujuan tercapai".(2014:30).

Dari pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa administrasi itu merupakan suatu proses kegiatan orang-orang (kelompok) yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang di tentukan sebelumnya. Administrasi dikatakan sebagai proses karena dalam menjalankan suatu kegiatan itu melalui tahap atau berkaitan dengan tahap yang berikutnya. Tahap itu merupakan fungsi yang di jalankan dan pencapaian tujuan itu akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa koordinasi adalah merupakan bagian dari proses manajemen yang saling berhubungan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Dari pendapat tersebut di atas terlihat, bahwa koordinasi merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh seorang pemimpin (administrator), dengan kata lain bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi seorang pemimpin dituntut mampu mengkoordinasikan segala aktivitas yang berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Kemudian organisasi dan administrasi dapat di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan. Karena organisasi merupakan wadah sekaligus alat administrasi untuk melaksanakan segala kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.

Hubungan antara organisasi dengan administrasi dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia, dalam wujudnya susunan tubuh dan jiwa manusia dapat di ibaratkan alat-alat untuk mencapai tujuan sedangkan jiwanya sebagai penggerak. Jadi manusia itu dapat mencaoai sesutuapabila di gerakan oleh jiwa dan sebaliknyaakan dapat mencapai tujuannya apabila memiliki alat-alat untuk mencapai tujuan itu.

Pencapaian tujuan organisasi pada setiap tingkat kegiatan dalam manajemen harus di koordinasikan supaya pekerja diarahkan pada suatu sasaran yang dikehendaki oleh organisasi. Untuk melaksanakan koordinasi perlu di perhatikan alat-alat yang tercantum seagai pegangan bagi setiap pemimpin, tanpa adanya rencana dan perencanaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, maka sulit untu dikoordinasikan.

Dalam melaksanakan koordinasi ada syarat tertentu yang perlu di ketahui oleh pemimpin organisasi disamping alat organisasi sebagai pegangan dalam melaksanakan koordinasi. Syarat

koordinasi ini menjelaskan bahwa koordinasi dapat tercipta apabila ada peranan dari pada pegawai pada tiap-tiap bagian dalam organisasi untuk bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya. Kemudian organisasi sedapat mungkin mengadakan persaingan antara bagian-bagian, dapat berlomba untuk mencapai kemajuan yang nantinya akan menunjang kemajuan organisasi bersangkutan. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan perasaan saling menghormati terhadap bawahannya (bagian/unit) disamping itu tiap-tiap bagian dalam organisasi harus di ikutsertakan dalam menentukan arah kebijaksanaan yang akan di tetapkan oleh organisasi karena bisa menimbulkan semangat kerja.

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya jenis pengembangan tertentu. Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Menurut Salah Wahab (2014) “agar suatu daerah wisata mempunyai daya tarik, dan objek wisata, suatu daerah tujuan wisata harus mempunyai syarat daya tarik yaitu : 1) ada sesuatu yang bisa dilihat (*something to see*), 2) ada sesuatu yang bisa dikerjakan (*something to do*), dan 3) ada sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*) (hlm 28)”.

Kawasan Anyer terletak di Kecamatan Anyer yang berada di Ujung Barat Kabupaten Serang Provinsi Banten. Objek wisata utama di kawasan ini adalah pesisir pantai yang panjang dan lebar, menghadap Selat Sunda, yang terdiri dari Pantai Anyer, Pantai Tanjung Tum, Pantai Bojong, dan Pantai Sambolo. Keempat pantai ini saling berhubungan dari Utara sampai ke Selatan dari Kecamatan Anyer dengan panjang bentangan pantai mencapai 25 km.

Pantai Anyer, Pantai Tanjung Tum, dan Pantai Sambolo umumnya merupakan pesisir yang tertutup oleh pasir kasar, pasir halus dan kerikil. Sedangkan Pantai Bojong selain tertutup oleh pasir dan kerikil disini terdapat Menara Mercusuar yang dibangun pada zaman Belanda dan dijadikan titik kilometer nol Jalan Raya Pos dari Anyer sampai panarukan. Keempat pantai tersebut dilihat dari morfologinya merupakan wilayah yang bergelombang dengan kemiringan lereng 0 – 15 % dengan kedalaman lautnya 0 m sampai dengan 15 m, kecepatan arus perairan sekitar 24,62 m/detik. Tingkat abrasi di Kawasan Anyer terbilang kecil yaitu berkisar antara 5 ha sampai 25 ha per tahun. Proses abrasi di Kawasan Anyer bergantung kepada naiknya permukaan air laut sebagai

akibat perubahan angin. Vegetasi lahan pada pantai terbuka di Kawasan Anyer umumnya berupa semak belukar dan pohon kelapa yang sengaja ditanam oleh pengelola pantai.

Ketersediaan air bersih cukup banyak dan dekat, karena pihak pengelola pantai menyediakan air bersih untuk kepentingan wisatawan. Keempat pantai terbuka di Kawasan Anyer memiliki potensi sarana dan prasarana kepariwisataan yang cukup baik hanya belum dimanfaatkan secara optimal oleh para wisatawan. Banyak wisatawan memilih untuk tinggal di pantai tertutup yang dikelola oleh hotel-hotel berbintang dan cottage. Sarana yang sudah tersedia di pantai terbuka berupa kios souvenir, kedai makanan dan minuman, lahan parkir, kamar mandi dan mushola

Dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan Keppres No. 63/2004, ciri-ciri OBVITNAS adalah sebagai berikut:

- a. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
- b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres diatas, maka obyek yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas Obvitnas dan Objek Tertentu, dapat berupa: industry, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energy, gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing, kawasan wisata, dan lembaga negara.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. preventif, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan;
- c. neessitas, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan;
- d. proporsional, yaitu dilaksanakan berdasarkan perkiraan ancaman atau gangguan yang mungkin terjadi;
- e. sinergitas, yaitu dilaksanakan secara terpadu antar- fungsi kepolisian, pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu serta instansi terkait;
- f. transparan, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.
- h. Pada bagian ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kedekatan dalam hal ruang lingkup dan beberapa variable penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Andre Christianto Paeh dalam jurnalnya yang berjudul ,”Peran Unit Pam Obvit Polres Magelang Dalam Pengamanan Objek Vital Nasional Candi Borobudur” Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang.

Penelitian ini dilatarbelakangi keberadaan Candi Borobudur yang merupakan objek wisata internasional yang menjadi salah satu objek vital nasional yang bersifat strategis. Sebagai situs cagar budaya, sangat pentinglah diberlakukannya pengamanan objek vital nasional terhadap Candi Borobudur oleh negara. Beberapa upaya negara dalam melakukan pengamanan tersebut terlihat dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 738 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional. Dituntut tanggung jawab Kepolisian dalam hal ini Unit Pam Obvit Polres Magelang dalam pengamanan serta mencegah terjadinya kejahatan, sehingga terjaminnya keamanan objek wisata Candi Borobudur dan timbulnya rasa aman bagi pengunjung objek wisata Candi Borobudur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen yang ada. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Manajemen POAC, dengan teori Pencegahan Kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengamanan oleh Unit Pam Obvit belum maksimal. Masih

banyaknya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan Unit Pam Obvit tidak maksimal. Adanya upaya pengamanan yang belum maksimal dilakukan Unit Pam Obvit dalam berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, maka perlunya anggota mengikuti dikjur Pam Obvit guna paham mengenai sistem pengamanan Obvitnas, mengikuti sekolah bahasa Polri guna pengamanan yang maksimal, perbaikan struktur organisasi Polres Magelang untuk Unit Pam Obvit menjadi Satuan Pam Obvit untuk pengamanan yang maksimal terhadap Obvitnas, penambahan anggaran dan sarpras untuk meningkatkan kinerja anggota, peningkatan koordinasi dengan pihak taman dan masyarakat, penambahan kualitas pengamanan fisik mulai dari pagar sampai pintu masuk.

Kedua, Frenly Sukarno dengan judul : “Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang Di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dinas pariwisata dan dinas kehutanan pada saat melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang masih kurang maksimal dilihat dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga penulis menyarankan agar kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan hendaknya pro-aktif melaksanakan koordinasi dalam bentuk komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, melalui organisasi yang dipimpin nya. Disamping itu pula disarankan agar kepala dinas pariwisata dan kepala dinas kehutanan serta lembaga lainnya yang berada di sekitar dinas pariwisata dan dinas kehutanan harus berusaha mengajak pengurus-pengurus yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata taman nasional kayan mentarang untuk melihat persoalan apa pun yang membutuhkan koordinasi sebagai tanggung jawab bersama.

Ketiga, laporan penelitian Dosen Muda oleh I Made Dedy Priyanto dkk, Universitas Udayana Bali dengan judul Efektifitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Pada Wilayah Hukum Polda Bali.

Penelitiannya bertujuan mengetahui peran dan kewenangan serta efektifitas polisi pariwisata dalam penanggulangan kejahatan di bidang pariwisata pada wilayah hukum Polda Bali. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di Unit Polisi Pariwisata Polda Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya polisi pariwisata, keamanan dan ketertiban khususnya di tempat-tempat wisata di



Bali lebih dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun gangguan-gangguan baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat memajukan pariwisata di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pariwisata Negara Republik Indonesia.

### **3. Metode**

Agar penelitian bisa berjalan sesuai dengan pedoman dan tidak menyimpang, maka desain penelitian merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan. Dengan adanya desain penelitian tujuan penelitian bisa lebih mudah diraih.

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian, atau sebagai strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Desain Penelitian Kuantitatif, yaitu menarik kesimpulan statistik pada pengumpulan data, informasi dan pengetahuan sangat diprioritaskan. Jumlah responden yang menyediakan pandangan yang berbeda dari pertanyaan penelitian juga lebih diutamakan dari pada jumlah yang banyak tapi memiliki pandangan yang sama. Pada metode desain penelitian kuantitatif ini data yang diambil dari responden yang dianalisis akan sangat membantu keputusan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif kausal yaitu suatu cara penelitian dengan mengumpulkan pendapat dari para responden yang dianggap representatif guna mengungkapkan hubungan kausal antara koordinasi dengan peningkatan keamanan, dengan pendekatan kuantitatif. Yang menjadi anggota populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 orang terdiri dari Dirpamobvit, Subditwisata dan seluruh anggota, Kapolres Serang, Kapolsek Anyer, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Pengelola tempat wisata, Ormas serta Wisatawan yang diambil secara random.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Stratified Random Sampling* dengan pendekatan *proportional stratified random sampling*. Adapun penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh artinya jumlah populasi sebanyak 48 orang maka jumlah sampel ditetapkan sebanyak 48 orang.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, Kapolri sebagai pimpinan Polri telah mengambil kebijakan dan menindak lanjuti dengan mendesain melalui grand strategi tahun 2005 – 2025. Seiring dengan grand strategi Polri tersebut Kapolri telah menetapkan langkah-langkah melalui transformasi perubahan kultur Polri yaitu melalui 9 (sembilan) pilar reformasi birokrasi Polri dan menjadi acuan bagi perwujudan Reformasi Birokrasi di jajaran wilayah hukum yang ada di Indonesia dalam hal ini Polda sebagai satuan induk penuh.

Reformasi di tubuh Polri telah membawa beberapa perubahan terutama pada bidang struktural sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah (Polda), dimana beberapa fungsi operasional mengalami likwidasi menjadi satuan kerja tersendiri salah satunya adalah Direktorat Pengamanan Obyek Vital yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan didalam fasilitas lembaga Negara, perwakilan Negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat" ..

Tugas pokok Polri tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menunjang seluruh proses pembangunan nasional agar dapat berjalan aman dan lancar.

Pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa konsekuensi bahwa keamanan dan pengamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas bagi aparat kepolisian, artinya predikat Banten sebagai kota tujuan wisata harus diimbangi dengan stabilitas keamanan yang kondusif. Hal tersebut menjadi salah satu Tupoksi Direktorat Pamobvit dalam hal ini Subditwisata.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dibidang kepariwisataan, perlu suatu manajemen keamanan yang baik dan efektif guna pemenuhan rasa aman dan nyaman pada kawasan/obyek wisata, kepada pengunjung (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara), terhadap otoritas pengelola industri pariwisata, pedagang, serta masyarakat sekitar objek wisata. Oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang memiliki kompetensi atau

kualifikasi khusus dibidang Pamobvit sehingga pemberdayaan polisi pariwisata dalam pelaksanaan Tupoksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam pengamanan obvitnas, Polri harus bekerjasama dengan berbagai stakeholders. Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui program Polmas yang telah dikembangkan Polri. Sedangkan dalam kerangka penanggulangan, perlu dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Sistem koordinasi ini dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

Persamaan Regresi ini digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel bebas (koordinasi) apabila nilai variabel terikat (keamanan) dimanipulasi (diubah-ubah). Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satu predictor) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Berdasarkan rumus tersebut di atas untuk dapat menentukan persamaan regresi maka terlebih dahulu harus ditentukan harga a dan b dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

**Diketahui :**

$$N = 48$$

$$\sum X = 946$$

$$\sum Y = 644$$

$$\sum XY = 13835$$

$$\sum X^2 = 20960$$

$$\sum Y^2 = 9602$$

**Menentukan harga a :**

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum x^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum x^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(644)(20960) - (946)(13835)}{48(20960) - (946)^2}$$

$$a = \frac{13498240 - 13087910}{1006080 - 894916}$$

$$a = \frac{410330}{111164}$$

$$a = 3.691$$

**Menentukan harga b.**

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum x^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{48(13835) - (946)(644)}{48(20960) - (946)^2}$$

$$b = \frac{664080 - 609224}{1006080 - 894916}$$

$$b = \frac{54856}{111164}$$

$$b = 0.493$$

Berdasarkan harga a dan harga b melalui perhitungan di atas, maka persamaan regresi koordinasi dan keamanan adalah sebagai berikut :

$$\check{Y} = 3.691 + 0.493X$$

Persamaan regresi yang telah ditentukan tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) berapa nilai dalam variabel terikat akan terjadi bila nilai dalam variabel bebas ditetapkan. Hal ini berarti bila koordinasi sampai ditingkat nilai optimal sesuai dengan skor ideal instrument yaitu  $5 \times 48 = 240$ , maka nilai akurasi keamanan, dapat dilihat sebagai berikut:

$$\check{Y} = 3.691 + 0.493(240)$$

$$\check{Y} = 3.691 + 118,32 = \mathbf{122,011}$$

Jadi diperkirakan nilai keamanan menjadi 122,011, jika nilai koordinasi dinaikan menjadi 240.

Sehingga dari persamaan di atas dapat diartikan, bahwa agar nilai keamanan bertambah, maka nilai rata-rata koordinasi harus dinaikan sebesar **118,32**.

**5. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, tentang pengaruh koordinasi oleh Ditpamobvit terhadap keamanan di kawasan wisata pantai Anyer, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil jawaban dari 48 responden, koordinasi oleh Ditpamobvit mencapai persentase sebesar 65.56%. Sedangkan nilai keamanan mencapai 67.68%. Perhitungan korelasi antara, koordinasi oleh Ditpamobvit dengan keamanan di kawasan wisata pantai Anyer diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar **0.9752**. Hal ini berarti bahwa antara koordinasi dan keamanan terdapat hubungan yang sangat kuat. Hasil perhitungan koefisien determinasi (KD) diperoleh nilai

sebesar **95.11%**. Hal ini menandakan bahwa koordinasi sebagai salah satu faktor sangat mempengaruhi keamanan yakni sebesar **95.11%**. Sedangkan sisanya yaitu **4.89%** keamanan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berangkat dari kesimpulan di atas, penulis menyajikan saran-saran sebagai berikut: Mengingat hubungan antara koordinasi dengan keamanan sangat kuat yakni sebesar 95.11%, maka koordinasi perlu ditingkatkan, sebab dengan meningkatkan koordinasi dapat meningkatkan keamanan di kawasan wisata pantai Anyer. Dari hasil survey menunjukkan bahwa kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai dalam koordinasi masih kurang hal ini adanya perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, dimana masing masing pihak mengembangkan pandangan-pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Oleh karena itu Direktorat Pamobvit Polda Banten terutama Direktur harus lebih meningkatkan peran sebagai seorang pemimpin yang dapat membimbing, membina dan mengawasi kinerja anggota, khususnya lebih bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya dari hasil survey juga menunjukkan adanya koordinasi yang belum sesuai dengan asas koordinasi yaitu adanya perbedaan dalam orientasi antar pribadi, dimana koordinator memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian lapangan mungkin memerlukan berbagai informasi dan pendapat melalui berbagai temuan dan diskusi dengan berbagai pihak terutama pengelola obyek wisata. Oleh karena itu menurut penulis perlu ditingkatkannya pola diskusi antar pihak terkait agar mereka dapat menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi bersama yang dapat menimbulkan koordinasi antar unit menjadi terhambat. Juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan diantara anggota dan pihak terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Deddy S dan Dadang S (2015), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Fandeli, Chafid. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberti

Handyaningrat, Soewarno, (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta

- Handoko, T. Hani. (2013). Manajemen, BPFE, Yogyakarta
- Hasibuan, S.P. Malayu, (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta
- Miftah Thoha, (2005). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mitra Bintibmas. (2010). Membangun Polisi Profesional. Jakarta : Bina Dharma Pemuda
- Manullang, M. (2011). Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Agus Tulus, (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moekijat, (2010). Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis), Mandar Maju, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, (2013). Kybernology 1 : Ilmu Pemerintahan baru, Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Ranupandojo , Heidjrachman & Suad Husnan,(2013). Manajemen Personalialia, BPFE, Yogyakarta.
- Sarwoto, 2019. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemirat, Soleh & Elvinaro Ardianto. (2008). Dasar-Dasar Public Relations. Bandung : PT. Remaja Rosdayakarya
- Spillane James J. (2017). Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Kanisius, Yogyakarta.
  - Sugandha, Dann, (2013). Koordinasi, Intermedia Press, Jakarta
  - Toha, Miftah, (2010). Kepemimpinan Dalam Manajemen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
  - Tulus, Agus, Moh., (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
  - Widjaya, HAW, (2010). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta